

**OPINI AUDIT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
(Studi Kasus di Pemerintah Kota Lhokseumawe yang Mengalami Penurunan
Opini Audit)**

**Yopi Zufadlin¹
Rina Maulina²**

¹⁾ Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh

²⁾ Universitas Teuku Umar - Meulaboh

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal di kotamadya Lhokseumawe dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal sebagai basis BPK dalam memberikan opini audit di kota Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, diperoleh dari ringkasan wawancara dan observasi dan juga dari laporan keuangan di kota Lhokseumawe sebagai objek penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan observasi, dokumentasi, dan melakukan wawancara. Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Meskipun penerapan sistem pengendalian internal di pemerintahan Lhokseumawe telah berjalan dengan baik, pengawasan yang baik masih diperlukan. Hal ini terjadi, karena beberapa kelemahan telah ditemukan terkait dengan pelaksanaan pengendalian internal, (2) sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara maksimal sejak tahun 2010. Namun, pada tahun 2011 dan 2012 telah menurun.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Pemerintah Kota, Opini Audit

Abstract: This research was conducted to determine how internal control system in Lhokseumawe municipality and to find out how the implementations of internal control system as the basis for BPK in giving auditor opinion for Lhokseumawe municipality. The research is a descriptive research. Types of used data in this study were primary and secondary data, obtained from the summary of interview and observation and also from financial report in Lhokseumawe municipality as the research object. In collecting the data, the researcher used observation, documental, and did interview. Then, the researcher analyzed the obtained data by using Miles and Huberman data analysis to answer the problems of this study. The results of this research shows that (1) In spite of the implementation of internal control system in Lhokseumawe government has been well implemented, a good supervision is still needed. This is happened, because some weaknesses has been found which is related with the implementation of internal control, (2) the internal control system has been implemented to the fullest since 2010. However, in 2011 and 2012 it has decreased.

Keywords: internal control, municipality, audit opinion.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Sejak era reformasi pertama digulirkan tuntutan yang paling utama adalah bagaimana membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, dewasa ini rendahnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah adalah masalah yang tengah hangat dibahas sejak program otonomi daerah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Menurut analisa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penyebab timbulnya masalah tersebut diantaranya: kesalahan pencatatan akuntansi yang menyebabkan salah saji material pada pelaporan keuangan, laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, serta ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah seperti yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan PP nomor 24 tahun 2005 yang masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yaitu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Sementara pelaksanaan terhadap pengelolaan APBD diselenggarakan berdasarkan SPI seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan SPIP seperti yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat (3) PP nomor 60 tahun 2008 adalah “untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pemberian opini audit itu sendiri diberikan oleh BPK RI sebagai lembaga resmi negara yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas auditnya, BPK juga berkewajiban untuk melakukan audit terhadap sistem pengendalian internal pemerintah seperti yang diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah”.

Pernyataan opini dari BPK tentunya tergantung bagaimana tingkat kepatuhan dalam pengelolaan SPI. Penelitian terdahulu telah dapat membuktikan bahwa SPI memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kualitas laporan keuangan instansi pemerintah (dalam hal ini adalah LKPD). Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2010), dengan judul *the influence of internal control system to the reliability of local goverment financial statement (case study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*, menyimpulkan bahwa semua elemen pengendalian yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan memiliki kontribusi terhadap keandalan laporan keuangan sebesar 72%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kelemahan SPI pemda terhadap opini BPK maka kajian ini akan mengambil sampel yaitu Pemerintah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan laporan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalami penurunan opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2010 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan tahun 2011 & 2012. Penurunan ini memiliki makna bahwa kualitas penyajian laporan keuangan serta tingkat kepatuhan dalam pengelolaan SPI oleh pemerintah daerah menjadi kurang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian atas fenomena yang telah dipaparkan diatas, mengingat betapa pentingnya peranan sistem pengendalian intern yang menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini audit bagi pemerintah daerah, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Pemerintah Kota Lhokseumawe yang Mengalami Penurunan Opini Audit)”**.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pengertian Audit

Menurut Arens *et al.*, (2008:4) *“auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”*. Pemeriksaan (audit) merupakan salah satu cara untuk menelusuri kebenaran dan kewajaran informasi keuangan suatu entitas pemerintahan maupun bisnis. Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah “proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar

pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara”.

Pengertian audit di atas sejalan dengan pengertian audit yang diberikan oleh Mulyadi (2002:9) “audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Pengertian Opini

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada paragraf penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jenis Opini Audit

Menurut Mulyadi (2002:416) terdapat lima tipe pendapat atas laporan keuangan auditan, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang perlu penjelasan, pemeriksa bisa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan hasil pemeriksaannya. Dalam kondisi ini, pemeriksa dapat menyatakan opini modifikasi yaitu WTP Dengan Paragraf Penjelasan.

3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah sebagai berikut:

- a) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak memberikan pendapat.
- b) Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Tidak Wajar (TW)

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

5. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah sebagai berikut; Pemeriksa tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan dan jika pemeriksa dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Menurut UU nomor 15 tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (*unqualified opinion*);
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (*qualified opinion*);
3. Opini Tidak Wajar – TW (*advers opinion*);
4. Opini Tidak Memberikan Pendapat – TMP (*disclaimer of opinion*);

Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, SPI adalah “suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah”. Sedangkan pengertian SPI menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemda, “SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan”.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Berdasarkan Pengertian SPI di atas mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPI, yaitu:

1) Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan, efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila mampu

menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar

2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/layak dipercaya, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3) Pengamanan aset

Aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerima pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara/daerah. Pengamanan aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya.

4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Di dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP disebutkan pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) unsur yang berhubungan, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang akan digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya dikarenakan semua yang akan dilakukan telah terencana berdasarkan urutan penelitiannya. Sifat studi penelitian ini adalah studi deskriptif. Sekaran (2006:162) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran penerapan sistem pengendalian intern dapat dijadikan dasar bagi auditor BPK dalam memberikan opini audit kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti tidak memiliki kemampuan untuk ikut mempengaruhi kondisi dalam penerapan sistem

pengendalian intern pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu tingkat intervensi peneliti rendah, dimana peneliti hanya mengumpulkan data dan selanjutnya dianalisis.

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Situasi tidak diatur yang dilakukan oleh peneliti tidak memiliki intervensi berlebih maupun sedang terhadap permasalahan yang akan diteliti karena peneliti hanya mengumpulkan data dan menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini merupakan analisis studi kasus. Studi kasus meliputi analisis kontekstual dan mendalam terhadap hal yang berkaitan dengan situasi serupa dalam organisasi lain (Sekaran, 2006:163).

Penelitian ini menggunakan unit analisis kelompok. Sekaran (2006:173) menjelaskan unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe 2010, 2011 dan 2012.

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *longitudinal*. Sekaran (2006:178) menjelaskan bahwa pada studi *longitudinal*, data variabel dikumpulkan pada dua atau lebih batas waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2010, 2011 dan tahun 2012.

Penelitian ini dilakukan pada organisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai komunitas, yang didalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 serta Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian yaitu pihak-pihak yang terkait pada organisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Data sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 yang dipublikasikan melalui *website* www.bpk.go.id.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan yang penting dalam melakukan penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian agar memperoleh informasi dan gambaran yang jelas terhadap fakta dan kondisi lapangan yang ada. Teknik observasi yang diterapkan adalah observasi partisipatif. Sugiyono (2012:64) mengemukakan bahwa dalam observasi partisipatif, peneliti

terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan serangkaian tanya jawab. Jadi dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2010, 2011 dan 2012, peraturan pemerintah, peraturan walikota Lhokseumawe, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi objek penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan untuk penganalisisan pada penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model Miles dan Huberman secara interaktif. Adapun langkah-langkah analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini (Sugiyono, 2012) adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Data yang dirangkum dan direduksi pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini dirangkum dan dipilih hal-hal yang penting dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Adapun sumber data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2010, 2011 dan tahun 2012.
2. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya serta dengan teks yang bersifat naratif.
3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi), adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Langkah ketiga ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan temuan SPI pada LHP tahun 2010, SPI pada LHP tahun 2011, dan SPI pada LHP tahun 2012 serta menarik kesimpulan dan saran atas temuan tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

Opini Audit Berdasarkan SPI

1. Pengelolaan investasi non permanen milik Pemerintah Kota Lhokseumawe kurang tertib dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini disebabkan karena dalam menyajikan saldo investasi non permanen di neraca Kota Lhokseumawe tidak memperhitungkan nilai wajar yang sebenarnya serta tidak melakukan penagihan secara intensif piutang Kota Lhokseumawe, belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program dana bergulir PER dan PEM. Kondisi ini bertentangan dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 07 tahun 2008 tentang Investasi Dana Bergulir BAB II Pengertian dan Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir, antara lain mengatur bahwa Satuan Kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.
2. Pengelolaan persediaan Kota Lhokseumawe belum tertib. Hal ini disebabkan petugas yang menangani persediaan tidak melakukan *stock opname* (penghitungan fisik persediaan) dan melaporkan hasilnya dalam neraca SKPD. Kondisi tersebut mengakibatkan angka persediaan *unaudited* yang dicantumkan di neraca tidak menggambarkan jumlah dan nilai yang sebenarnya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan nomor 5 perihal penilaian persediaan yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
3. Pengelolaan dan Sistem Pengendalian Intern penerimaan pendapatan belum memadai, hal ini disebabkan oleh belum ada SOP yang mengatur mengenai pencatatan dan pelaporan PAD, tidak melakukan koordinasi dalam pencatatan pendapatan serta tidak memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tenaga operator sistem yang dioperasikan untuk penyusunan LKPD. Kondisi tersebut mengakibatkan data yang diperoleh dari sistem akuntansi sulit diyakini kewajarannya, kerahasiaan data tidak dapat dijamin karena tingkat ketergantungan yang tinggi pada tenaga *outsourcing*. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern; pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, dan pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1) reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, 2) pembinaan sumber daya manusia, 3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, 4) pengendalian fisik atas aset, 5) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, 6) pemisahan fungsi, 7) otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, 8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, 9) pemisahan fungsi, 10) otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, 11) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, 12) pembatasan akses atas sumber

daya dan pencatatannya, 13) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan 14) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Pengelolaan dan penyajian piutang daerah belum tertib, kondisi tersebut terjadi karena aparaturnya tidak menghitung nilai piutang pajak yang berasal dari pajak restoran yang ditetapkan menggunakan *bill* dan tidak melakukan proses rekonsiliasi atas realisasi pendapatan transfer, baik secara internal antar bidang dalam SKPD, maupun secara eksternal dengan Kementerian Keuangan dan kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan piutang daerah dan belum menyusun mekanisme pengelolaan piutang termasuk mekanisme penatausahaan, pelaporan dan penghapusannya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 53 lampiran I.01 yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Pemerintah Kota Lhokseumawe telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang mengatur pelaksanaan SPI pada Pemerintah Daerah/Kota. Walaupun begitu, SPI yang diterapkan saat ini masih perlu adanya pengawasan yang baik dikarenakan beberapa hal yang ditemukan terkait dengan penerapan pengendalian intern terdapat beberapa kelemahan.
- 2) Opini audit atas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan sistem pengendalian intern yang telah diterapkan masih banyak terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut disinyalir disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dan melanggar apa yang telah diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal aturan pelaporan maupun dalam hal pencatatan keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe.

Saran

- 1) Diharapkan adanya pengawasan yang ketat dan terorganisir atas penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- 2) Pemberian tanggung jawab dan wewenang bagi pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengawasi SPI dimana diperlukan keahlian maupun pemahaman yang baik terhadap penerapan pengendalian intern.
- 3) Penyusunan dan perancangan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku dan tertulis yang berguna untuk pengendalian intern agar terstruktur guna meminimalkan penyelewengan.
- 4) Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk segera menangani masalah pengendalian fisik atas aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota karena hal ini dapat berakibat fatal.

- 5) Diharapkan penelitian ini di masa mendatang menjadi lebih baik lagi dari penelitian yang telah dilakukan sekarang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arens, A.A., & Elder, R.J, & Beasley, M.S. 2008. ***Auditing and Assurance Service – An Integrated Approach***, 9th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Mulyadi. 2002. ***Auditing***. Jakarta: Salemba Empat.

Nugraha, Darya Setia. 2010. The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat). ***Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi***, Vol. 2(2), pp. 259-280.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemda.*

_____. *Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

_____. *Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

_____. *Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.*

_____. *Undang-Undang nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

_____. *Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

_____. *Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Sekaran, Uma. 2006. ***Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis***. Buku 1. Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. ***Memahami Penelitian Kualitatif***. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta.